

**BAB V**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**5.1 Perkembangan Inflasi, Jumlah SPPT, PDRB Perkapita dan Penerimaan PBB Di Kota Jambi Selama Tahun 2014-2023**

Berikut adalah ringkasan perkembangan inflasi, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi selama periode 2014 hingga 2023:

**5.1.1 Perkembangan Inflasi**

Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas dan menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Untuk mengetahui kondisi inflasi di Kota Jambi selama tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1 Inflasi Kota Jambi Tahun 2014-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Inflasi (%)</b>
2014	8,72
2015	1,37
2016	4,54
2017	2,68
2018	3,02
2019	1,27
2020	3,09
2021	1,67
2022	6,39
2023	3,27
Rata-Rata	3,60

**Sumber : BPS Kota Jambi, 2024**

Data inflasi Kota Jambi selama periode 2014-2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan angka rata-rata inflasi sebesar 3,60%. Tahun dengan inflasi tertinggi tercatat pada 2014, yakni 8,72%, sementara inflasi terendah terjadi

pada 2019, hanya sebesar 1,27%. Kondisi ini mencerminkan berbagai dinamika ekonomi yang mempengaruhi laju inflasi, termasuk perubahan harga barang dan jasa, kondisi perekonomian nasional, serta kebijakan pemerintah setempat. Penurunan tajam dari 8,72% di tahun 2014 menjadi 1,37% di tahun 2015 bisa mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi yang diterapkan oleh pemerintah pada tahun tersebut. Namun, angka yang kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 4,54% menandakan adanya faktor lain, seperti kenaikan harga bahan pokok atau gangguan pada rantai pasokan, yang berkontribusi pada perubahan angka inflasi di kota ini.

Tahun 2019 yang mencatat inflasi terendah dengan 1,27% menunjukkan stabilitas harga yang cukup baik, kemungkinan besar didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang efektif, serta kestabilan harga komoditas di pasar. Stabilitas inflasi pada tahun tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh rendahnya permintaan atau adanya pengawasan ketat terhadap kenaikan harga barang. Namun, lonjakan inflasi pada tahun 2022 sebesar 6,39% menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup besar, kemungkinan akibat dari peningkatan biaya bahan baku atau perubahan dalam kebijakan ekonomi global yang berimbas pada kenaikan harga impor. Meskipun kondisi kembali stabil pada 2023 dengan inflasi sebesar 3,27%, lonjakan pada tahun 2022 perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk merencanakan langkah antisipatif dalam menghadapi kemungkinan kenaikan harga yang lebih besar di masa depan.

Masalah utama dalam perkembangan inflasi Kota Jambi ini terletak pada tingginya fluktuasi yang terjadi dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa stabilitas harga masih rentan terhadap berbagai faktor internal dan eksternal. Angka inflasi yang tidak stabil bisa berdampak pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Ketidakpastian inflasi juga berpotensi menghambat investasi di Kota Jambi, karena para investor cenderung lebih memilih lingkungan ekonomi yang stabil. Rata-rata inflasi sebesar 3,60% sebenarnya masih dalam batas yang moderat, namun stabilitas yang lebih konsisten akan lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia,

dan pihak-pihak terkait untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengendalikan inflasi, seperti memantau harga bahan pokok secara berkala, menstabilkan pasokan barang, serta menjaga ketersediaan stok barang yang memengaruhi harga di pasaran.

### 5.1.2 Perkembangan Jumlah SPPT

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak, berisi informasi mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. SPPT PBB mencantumkan data seperti Nomor Objek Pajak (NOP), nama wajib pajak, alamat objek pajak, luas tanah dan bangunan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Penerbitan SPPT PBB dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah melalui pajak. Wajib pajak diharapkan membayar PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya. Untuk mengetahui perkembangan jumlah SPPT PBB di Kota Jambi selama tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.2 Perkembangan Jumlah SPPT Kota Jambi Tahun 2014-2023**

Tahun	Jumlah SPPT	Perkembangan (%)
2014	128.116	-
2015	132.892	3,73
2016	141.791	6,70
2017	128.887	-9,10
2018	129.671	0,61
2019	143.769	10,87
2020	146.645	2,00
2021	148.890	1,53
2022	151.556	1,79
2023	154.248	1,78
Rata-Rata		2,21

Sumber : BPS Kota Jambi, 2024

Tabel 5.2 menunjukkan perkembangan jumlah SPPT di Kota Jambi selama periode 2014-2023 dengan variasi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Rata-rata perkembangan tahunan sebesar 2,21% menunjukkan tren yang moderat,

meskipun terdapat fluktuasi besar dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada periode di mana jumlah SPPT meningkat dengan tajam, ada juga tahun-tahun tertentu yang mengalami penurunan yang signifikan. Secara keseluruhan, angka rata-rata ini mencerminkan kestabilan yang moderat dalam perkembangan SPPT Kota Jambi selama dekade terakhir.

Perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan kenaikan sebesar 10,87%. Lonjakan yang cukup besar ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor eksternal maupun internal, seperti adanya kebijakan baru atau peningkatan signifikan dalam jumlah objek pajak yang terdaftar. Peningkatan tajam pada tahun tersebut bisa menjadi fenomena yang mencerminkan perubahan dalam kebijakan perpajakan atau peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kota Jambi mungkin mengalami perbaikan dalam sektor administrasi perpajakan pada tahun tersebut.

Sebaliknya, perkembangan terendah terjadi pada tahun 2017 dengan penurunan sebesar -9,10%. Penurunan ini menunjukkan adanya kontraksi yang cukup signifikan dalam jumlah SPPT yang dikeluarkan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, misalnya penurunan jumlah objek pajak yang terdaftar atau perubahan dalam kebijakan perpajakan. Fenomena ini mungkin mencerminkan adanya kesulitan dalam meningkatkan basis pajak atau penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi jumlah pajak yang terhimpun. Namun, meskipun terjadi penurunan pada tahun tersebut, data menunjukkan bahwa jumlah SPPT kembali menunjukkan tren positif pada tahun-tahun berikutnya.

### **5.1.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan suatu wilayah atau negara. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi diukur melalui persentase perubahan produk domestik regional bruto (PDRB) dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, termasuk peningkatan produksi barang dan jasa, pendapatan masyarakat, dan lapangan pekerjaan. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.3 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi Tahun 2014-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (Persen)</b>
2014	8,18
2015	5,12
2016	6,84
2017	4,68
2018	5,30
2019	4,73
2020	-4,24
2021	4,13
2022	5,38
2023	6,61
Rata-Rata	5,44

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5.3 yang menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi dari tahun 2014 hingga 2023. Selama periode ini, ekonomi Kota Jambi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2014 sebesar 8,18% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2020 sebesar -4,24%. Penurunan tajam pada tahun 2020 ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang memengaruhi berbagai sektor ekonomi dan menyebabkan kontraksi pada perekonomian kota. Namun, setelah tahun 2020, ekonomi Kota Jambi menunjukkan pemulihan yang konsisten dengan tingkat pertumbuhan yang kembali positif.

Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Jambi selama periode 2014-2023 tercatat sebesar 5,44%. Ini menunjukkan bahwa secara umum, perekonomian Kota Jambi berkembang pada laju yang cukup sehat meskipun ada tantangan dan gangguan pada beberapa tahun tertentu. Fluktuasi yang terlihat dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi global, kebijakan ekonomi nasional, serta dinamika sektor-sektor ekonomi lokal, seperti perdagangan, jasa, dan industri yang mendominasi perekonomian di wilayah tersebut.

Penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai -4,24%, menunjukkan dampak besar pandemi terhadap kegiatan ekonomi. Namun, pemulihan terlihat mulai tahun 2021 dengan pertumbuhan positif sebesar 4,13% dan terus meningkat hingga mencapai 6,61% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi Kota Jambi dalam menghadapi krisis serta efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kembalinya aktivitas ekonomi di kota ini.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik setelah tahun 2020 menandakan adanya peningkatan aktivitas bisnis dan investasi di Kota Jambi. Pemulihan yang kuat ini juga bisa menjadi indikasi adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam upaya membangkitkan sektor-sektor yang terdampak pandemi, seperti pariwisata, perdagangan, dan sektor informal lainnya. Selain itu, pertumbuhan yang konsisten juga mencerminkan adanya potensi pengembangan ekonomi yang terus berkembang di Kota Jambi.

Namun, pertumbuhan yang fluktuatif juga menunjukkan bahwa perekonomian Kota Jambi masih rentan terhadap perubahan eksternal dan membutuhkan diversifikasi ekonomi yang lebih kuat. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat mendorong sektor-sektor yang berpotensi menjadi pilar ekonomi baru, seperti sektor teknologi dan industri kreatif, yang lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,44% selama 10 tahun terakhir mencerminkan kinerja ekonomi yang relatif baik di Kota Jambi, dengan beberapa tantangan di tahun-tahun tertentu. Ke depannya, pemerintah diharapkan terus mempertahankan pertumbuhan ini dan beradaptasi dengan perubahan global agar perekonomian kota tetap berkembang secara berkelanjutan.

#### **5.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi individu atau badan hukum yang memiliki hak atasnya atau memanfaatkannya. PBB bersifat kebendaan, artinya besaran pajak ditentukan berdasarkan kondisi objek pajak, yaitu bumi dan/atau bangunan, tanpa

mempertimbangkan kondisi subjek pajak. Untuk mengetahui perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi selama tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.4 Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Jambi Tahun 2014-2023**

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan (Rp. Juta)	Perkembangan (%)
2014	22029	-
2015	19629	-10,89
2016	18179	-7,39
2017	21980	20,91
2018	20108	-8,52
2019	24.773	23,20
2020	25.596	3,32
2021	26.389	3,10
2022	27.134	2,82
2023	32.285	18,98
Rata-Rata		5,06

Sumber : BPPRD Kota Jambi, 2024

Tabel 5.4 menunjukkan perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi selama periode 2014-2023. Rata-rata perkembangan tahunan sebesar 5,06% menunjukkan adanya peningkatan dalam penerimaan PBB, meskipun terdapat fluktuasi yang cukup signifikan. Angka rata-rata ini memberikan gambaran bahwa kebijakan pemungutan PBB di Kota Jambi berjalan cukup efektif secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa tahun dengan penurunan yang memengaruhi stabilitas penerimaan. Variasi dalam penerimaan pajak ini menunjukkan adanya dinamika yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal, seperti ekonomi lokal, ataupun perubahan dalam jumlah objek pajak.

Perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2019, dengan kenaikan sebesar 23,20%. Kenaikan ini dapat mencerminkan peningkatan jumlah objek pajak atau peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Tahun tersebut mungkin juga menandakan adanya penyesuaian kebijakan atau intensifikasi dalam upaya penagihan oleh pemerintah daerah. Fenomena ini menunjukkan potensi besar dari kontribusi pajak daerah, di mana peningkatan yang signifikan dalam satu tahun

dapat membantu menstabilkan anggaran daerah serta mendukung program pembangunan lainnya di Kota Jambi.

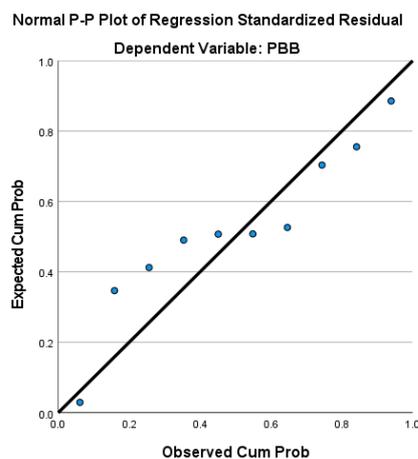
Sebaliknya, perkembangan terendah terjadi pada tahun 2015 dengan penurunan sebesar -10,89%. Penurunan tajam ini mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang stabil atau penurunan kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh termasuk revisi dalam penetapan nilai jual objek pajak atau pengurangan jumlah objek pajak terdaftar. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis. Namun, secara keseluruhan, penerimaan PBB Kota Jambi menunjukkan peningkatan yang stabil setelah tahun 2017, menandakan bahwa upaya perbaikan dalam sistem perpajakan dan penagihan pajak telah membawa hasil positif dalam beberapa tahun terakhir.

## 5.2 Pengaruh Inflasi, Jumlah SPPT dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan PBB Di Kota Jambi

### 5.2.1. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data penelitian adalah untuk menguji apakah dalam model statistik variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang tinggi adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan analisis grafik seperti pada gambar berikut :



Gambar 5.1 Grafik Histogram Normalitas

Gambar 5.1 mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdistribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal. Berdasarkan pada grafik histogram normal probabiliti, menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak dipakai dalam penelitian karena memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat diantara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

**Tabel 5.5 Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
INF	0,872	1,147
JS	0,935	1,070
PE	0,832	1,201

Sumber : Data Olahan (2023)

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh pada masing variabel seperti terlihat pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolonieritas karena nilai VIF dibawah angka 10.

## 3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi/keterkaitan antara serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi dalam perhitungan regresi atas penelitian ini maka digunakan Durbin-Watson Test sebesar 2,055.

Dengan menggunakan tabel statistik d dan derajat kepercayaan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) jumlah observasi 10 serta jumlah variabel bebas 3 maka diperoleh angka  $d_l = 0,525$  dan  $d_u = 2,016$  sedangkan nilai untuk  $4-d_l = 2,475$  dan  $4-d_u = 1,984$  dengan

menggunakan uji statistik Durbin Watson dua ujung (two tailed) maka patokan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$d < d_l$  = berarti terdapat autokorelasi positif

$d > d_U$  = berarti tidak terdapat autokorelasi positif

$(4-d) < d_l$  = berarti terdapat autokorelasi negative

$(4-d) > d_U$  = berarti tidak terdapat autokorelasi negative

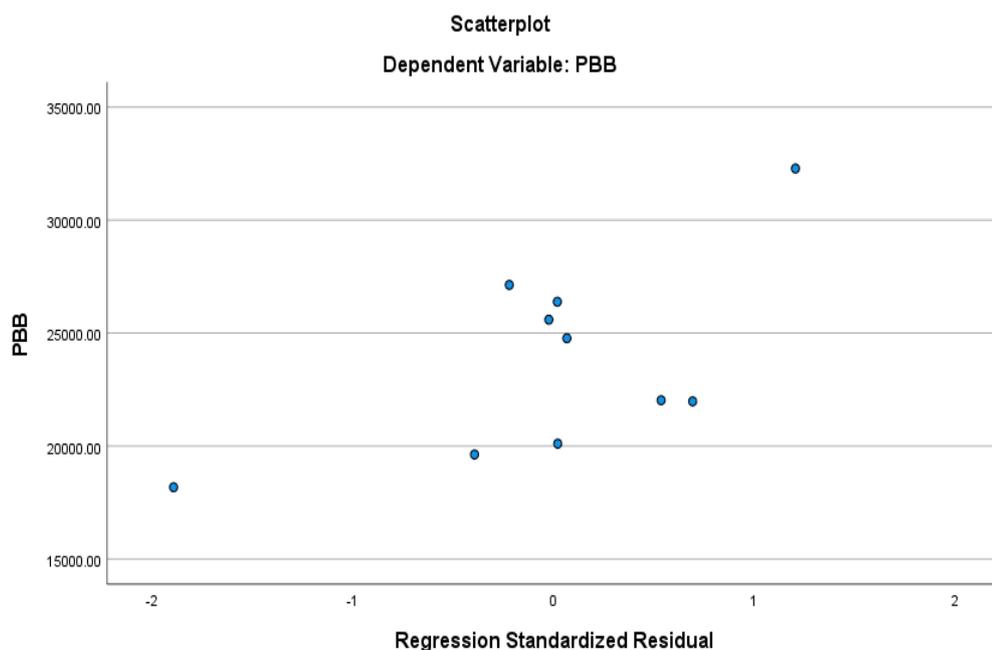
$d_U < d < (4-d_U)$  = berarti tidak terdapat autokorelasi

$d_l < d < d_U$  atau  $(4-d_l) > d > (4-d_U)$  = berarti tidak dapat disimpulkan

hasil yang diperoleh adalah nilai DW observasi terletak pada daerah  $d > d_U$  atau tidak terdapat autokorelasi positif dalam penelitian ini.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan gambar grafik nilai-nilai residu, uji Breusch-Godfrey dan Uji Park. Penelitian ini menggunakan uji Breusch-Godfrey.



Gambar 5.2 Uji Heteroskedastisitas

Dengan melihat gambar 5.2 diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 dan Sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model.

## 5.2.2 Uji Hipotesis

### 1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk untuk mengetahui apakah variabel-variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5$  persen). Untuk menguji pengaruh antara variabel bebas (variabel independen) yaitu inflasi, Jumlah SPPT dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap variabel terikat (variabel dependent) yaitu Penerimaan PBB di Kota Jambi secara simultan digunakan alat uji F statistik yang dapat dilihat pada hasil output program SPSS 27 pada tabel ANNOVA sebagai berikut :

**Tabel 5.6 Hasil Uji F Statistik**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	99448648.190	3	33149549.397	3.127	.109 <sup>b</sup>
	Residual	63608945.410	6	10601490.902		
	Total	163057593.60	9			
		0				

a. Dependent Variable: PBB

b. Predictors: (Constant), PE, JS, INF

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil regresi diketahui atau diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,109 dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, hal ini dapat diartikan bahwa variabel bebas (inflasi, Jumlah SPPT dan Pertumbuhan Ekonomi) secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Penerimaan PBB) di Kota Jambi selama periode 2014-2023.

### 2. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik merupakan pengujian secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependent dengan menganggap variabel lainnya konstan. Untuk melihat hasil setiap variabel terikat secara parsial yang diuji dengan uji-t secara rinci

koefisien regresi pada setiap variabel dapat dilihat pada tabel 5.7 yang menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 5.7 Hasil Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients <sup>a</sup>		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	-24084.610	16433.424		-1.466	.193		
INF	129.920	490.411	.072	.265	.800	.872	1.147
JS	.337	.113	.789	2.992	.024	.935	1.070
PE	9.995	354.094	.008	.028	.978	.832	1.201

a. Dependent Variable: PBB

Sumber : Data Diolah, 2024

**a. Variabel inflasi**

Dari hasil pengujian diperoleh nilai sig sebesar 0,800 dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 artinya Ho diterima dan H1 ditolak, artinya inflasi di Kota Jambi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PBB di Kota Jambi. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh inflasi terhadap Penerimaan PBB di Kota Jambi tahun 2014-2023 tidak benar dan tidak terbukti.

**b. Variabel jumlah SPPT**

Dari hasil pengujian diperoleh nilai sig sebesar 0,024 dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 artinya Ho ditolak dan H1 diterima, artinya jumlah SPPT di Kota Jambi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB di Kota Jambi. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh jumlah SPPT terhadap Penerimaan PBB di Kota Jambi tahun 2014-2023 benar dan terbukti.

**c. Variabel Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil pengujian diperoleh nilai sig sebesar 0,978 dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 artinya Ho diterima dan H1 ditolak, artinya Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PBB di Kota Jambi. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan PBB di Kota Jambi tahun 2014-2023 tidak benar dan tidak terbukti.

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis koefisiensi determinasi (KD) digunakan untuk melihat beberapa besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat yang dinyatakan dalam persentase. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 5.8. Hasil Uji  $R^2$  Square**

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Sig. F Change	Durbin-Watson
					R Change	F Change	df1	df2		
1	.781 <sup>a</sup>	.610	.415	3255.99307	.610	3.127	3	6	.109	2.055

a. Predictors: (Constant), PE, JS, INF

b. Dependent Variable: PBB

Sumber : Data Diolah, 2024

Tabel 5.8 diatas dapat dilihat *model summary* diketahui nilai  $R_{square}$  sebesar 0,610. Nilai tersebut menunjukkan bahwa inflasi, Jumlah SPPT dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan PBB secara simultan (keseluruhan) sebesar 61 persen dan 39 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

### 5.3 Analisis Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi di Kota Jambi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PBB di Kota Jambi selama tahun 2014-2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh (Yani & Purnamaningrum, 2024) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari inflasi terhadap penerimaan PBB secara parsial dan penelitian (Panjaitan et al., 2020) juga menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tidak berpengaruhnya inflasi terhadap Penerimaan PBB di Kota Jambi selama tahun 2014-2023 dikarenakan salah satunya adalah penetapan tarif PBB yang tetap oleh pemerintah daerah, yang tidak terpengaruh langsung oleh inflasi. Selain itu, sistem penilaian objek pajak di Kota Jambi mungkin tidak sensitif terhadap perubahan inflasi, mengingat penilaian ulang objek pajak dilakukan secara berkala dan tidak selalu disesuaikan dengan tingkat inflasi. Kebijakan pemerintah

daerah yang menjaga kestabilan tarif dan nilai objek pajak juga dapat membatasi dampak inflasi terhadap penerimaan PBB. Selain itu, stabilitas ekonomi lokal di Kota Jambi dapat turut mengurangi pengaruh inflasi terhadap PBB. Jika sektor-sektor utama ekonomi tetap berkembang secara stabil, penerimaan PBB dapat terjaga meskipun terjadi inflasi secara nasional. Pemerintah Kota Jambi juga mungkin menerapkan kebijakan seperti pemutihan atau diskon PBB, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat penerimaan pajak. Dengan demikian, meskipun inflasi berdampak pada perekonomian secara umum, kebijakan dan faktor-faktor lokal ini menjaga agar penerimaan PBB tetap stabil.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB di Kota Jambi selama tahun 2014-2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari jumlah SPPT terhadap penerimaan PBB.

Berpengaruhnya jumlah SPPT terhadap Penerimaan PBB di Kota Jambi selama tahun 2014-2023 dikarenakan pertama, peningkatan jumlah objek pajak yang tercatat dalam SPPT secara langsung berpengaruh pada penerimaan PBB. Seiring dengan berkembangnya wilayah dan bertambahnya pembangunan perumahan atau bangunan komersial, jumlah objek pajak yang tercatat juga meningkat, yang berarti lebih banyak wajib pajak yang dikenakan PBB. Selain itu, kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang tercatat dalam SPPT juga memainkan peran penting, karena semakin tinggi nilai properti, semakin besar pula jumlah PBB yang harus dibayar. Efektivitas sistem penagihan pajak juga turut menentukan seberapa optimal penerimaan PBB, karena meskipun jumlah SPPT meningkat, jika penagihan pajak tidak efektif dan banyak wajib pajak yang tidak membayar, penerimaan PBB akan tetap terhambat. Kebijakan pemerintah daerah yang memperluas basis pajak, seperti pemetaan objek pajak yang lebih akurat atau perubahan tarif pajak, turut mendorong peningkatan jumlah SPPT dan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Terakhir, faktor ekonomi dan sosial juga tidak kalah penting; jika ekonomi Kota Jambi berkembang pesat dengan peningkatan daya beli masyarakat, penerimaan PBB cenderung meningkat. Sebaliknya, jika

kondisi ekonomi melemah, meskipun jumlah SPPT bertambah, penerimaan PBB bisa terhambat karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kombinasi antara faktor-faktor tersebut sangat menentukan pengaruh jumlah SPPT terhadap penerimaan PBB di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PBB di Kota Jambi selama tahun 2014-2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asriati & Huda, 2016) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan PBB.

Tidak berpengaruhnya Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan PBB di Kota Jambi selama tahun 2014-2023 dikarenakan ketergantungan penerimaan PBB yang lebih besar pada jumlah objek pajak dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, daripada pada daya beli masyarakat yang tercermin dalam Pertumbuhan Ekonomi. PBB lebih dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan penilaian objek pajak, seperti tanah dan bangunan, yang tidak selalu berhubungan langsung dengan tingkat pendapatan masyarakat. Meskipun Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan, penerimaan PBB bisa tetap stabil jika tidak ada penyesuaian signifikan pada objek pajak atau tarif yang dikenakan.

Selain itu, meskipun Pertumbuhan Ekonomi mencerminkan daya beli masyarakat, penerimaan PBB lebih dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dan menilai objek pajak. Jika tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban PBB rendah atau jika ada kebijakan pemutihan atau pengurangan tarif pajak, maka peningkatan Pertumbuhan Ekonomi tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan PBB. Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kota Jambi, yang mungkin membuat Pertumbuhan Ekonomi tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membayar PBB. Dengan demikian, meskipun Pertumbuhan Ekonomi mengalami perubahan, penerimaan PBB bisa tetap tidak terpengaruh.